

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan tokopedia terkait dengan perdagangan ilegal satwa dilindungi, menjadi isu krusial yang akan berdampak negatif pada ekosistem satwa. Kelanjutan kasus perdagangan ilegal satwa dilindungi pada Tokopedia, diduga kuat disebabkan oleh kebijakan internal *platform* yang belum sepenuhnya mengadopsi standar aturan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, diperparah dengan minimnya pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap produk yang diunggah maupun yang sudah aktif diperjualbelikan. Hal ini tentunya didukung melalui beberapa undang, yakni : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.
2. Tokopedia perlu mengadopsi strategi kolaborasi baru. Strategi ini melibatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan. Kerja sama yang terjalin akan mencakup pembagian peran dan tugas yang jelas bagi masing-masing pihak. Tokopedia akan bertanggung jawab untuk memblokir iklan dan produk yang terindikasi sebagai perdagangan ilegal satwa dilindungi. Sementara itu, Kementerian Kehutanan akan berperan aktif dalam melakukan pemantauan daring (*online monitoring*) di *platform* Tokopedia. Pemantauan ini krusial untuk mengenali tren dan pola perdagangan satwa dilindungi. Terakhir Kepolisian Republik Indonesia, selaku pihak memiliki tim khusus siber mereka yaitu Cyber Police dan Virtual Police akan menindaklanjuti pelaku kejahatan perdagangan ilegal satwa yang terdeteksi. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam melindungi kelestarian satwa di Indonesia.

B. Saran

Penelitian ini tentunya mengharapkan adanya hubungan kerjasama terhadap ketiga pihak yaitu: Tokopedia, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

1. Penelitian ini juga mengharapkan, tokopedia tidak hanya memperhatikan sistem keamanannya terhadap jenis kejahatan perdagangan satwa dilindungi saja melainkan akan tetapi wajib meliputi produk-produk yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia seperti peredaran obat-obatan yang membutuhkan dosis dari dokter dan peredaran barang-barang palsu.
2. Penelitian ini juga mengharapkan, Kementerian Kehutanan diharapkan menyediakan *website* khusus yang menjelaskan jenis-jenis peredaran satwa di Indonesia, tentunya *website* tersebut bisa menggunakan bantuan kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*) oleh KLHK khusus untuk menjelaskan jenis-jenis peredaran satwa di Indonesia.
3. Penelitian ini juga mengharapkan, Kepolisian Republik Indonesia membagi tugas utama pada, unit *virtual police* dan *cyber police* agar tidak hanya diterapkan pada jenis-jenis kejahatan melalui sosial media saja melainkan dapat diterapkan pada jenis-jenis kejahatan yang terjadi melalui *e-Commerce* seperti yang terjadi pada tokopedia. Harapan tersebut tentunya dapat memberikan contoh baru kepada para penegak hukum lainnya, supaya menciptakan ruang lingkup baru untuk penegakan hukum yang lebih handal.